



Article Informations
Corresponding Email:
hkhibrann@gmail.com

Received: 29/01/2025; Accepted:
09/02/2025; Published: 30/06/2025

DAMPAK SENGKETA PERBATASAN INDIA – CHINA TERHADAP KEBIJAKAN BOIKOT INDUSTRI TEKNOLOGI TAHUN 2020 - 2023

Haikal Khibran

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

India adalah negara besar dengan geografi yang beragam, dari puncak Himalaya hingga hutan hujan tropis di selatan. Dengan populasi yang besar, India menjadi pasar utama bagi China. Namun, hubungan kedua negara menurun akibat konflik perbatasan yang kembali pecah pada 9 Desember 2020 di Tawang, Arunachal Pradesh, wilayah yang juga diklaim oleh China. Insiden ini menewaskan 20 tentara India dan melukai 76 lainnya, sehingga memengaruhi kerja sama ekonomi kedua negara. India merespons dengan memboikot industri teknologi China, kebijakan yang masih berlangsung hingga 2023. Meski tegas, kebijakan ini berdampak pada masyarakat India yang bergantung pada produk China. Penelitian ini menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong India memboikot teknologi China akibat konflik perbatasan. Menggunakan metode kualitatif eksplanatif melalui studi pustaka, analisis dilakukan berdasarkan teori realisme neoklasik dengan konsep kebijakan luar negeri James N. Rosenau, yang mencakup lima variabel utama.

Kata Kunci : Sengketa Perbatasan, India, China, Boikot

Abstract

India is a large country with a diverse geography, from the Himalayan peaks to the tropical rainforests in the south. With a large population, India is a major market for China. However, relations between the two countries declined due to a border conflict that broke out again on December 9, 2020 in Tawang, Arunachal Pradesh, an area also claimed by China. The incident killed 20 Indian soldiers and injured 76 others, affecting economic cooperation between the two countries. India responded by boycotting China's tech industry, a policy that lasts until 2023. Although firm, this policy has an impact on Indian society

that depends on Chinese products. This research analyzes the internal and external factors that drive India to boycott Chinese technology due to border conflicts. Using an explanatory qualitative method through literature study, the analysis is based on neoclassical realism theory with James N. Rosenau's foreign policy concept, which includes five main variables.

Key Words : *Border Dispute, India, China, Boycott*

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan negara sering kali terlibat dalam perselisihan, baik dalam skala kecil maupun serius. Sengketa ini sering kali berkembang menjadi konflik politik antara dua negara bertetangga, yang berdampak serius secara sosial, budaya, dan ekonomi, terutama bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan. (Dewi, 2024) Perbatasan India-China membentang di sepanjang pegunungan Himalaya, dengan perbedaan klaim yang paling mencolok di kedua ujung wilayah tersebut. Di sebelah barat, China menguasai 38.000 km persegi wilayah yang juga diklaim New Delhi; di sebelah timur, India memiliki lahan seluas 90.000 km persegi yang menurut Beijing adalah milik China. (Malik, 2017)

Walaupun hubungan kedua negara secara resmi terjalin pada 1 April tahun 1950 – an, dengan kerja sama ekonomi yang terus berkembang. Tetapi hubungan antara kedua negara mulai memburuk setelah tahun 1959, dengan ketegangan yang tidak mereda selama bertahun – tahun. Akhirnya konflik memuncak pada tahun 1962 yang disebut sebagai Perang Sino-India. (Rizal Jawahir Gustav, 2020) Perang ini dimulai pada bulan Oktober saat China tiba-tiba meluncurkan serangan militer di beberapa titik di perbatasan dan berakhir dengan China mendeklarasikan gencatan senjata di bulan November 1962. Konflik India-China dipicu atas sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama, terutama di wilayah Aksai Chin, Garis McMahon, dan Arunachal Pradesh. Hubungan bilateral kembali memburuk setelah bentrokan militer pada 2020 di Lembah Galwan, Ladakh, terkait klaim wilayah tersebut. (Davidson, 2017)

Pada tahun 2020, tanpa sepengetahuan India, China secara diam-diam meluncurkan pasukan militernya ke wilayah Ladakh. Alasan China bergerak dengan mengerahkan pasukan ke wilayah Ladakh didasari oleh

tindakan sebelumnya yang dilakukan oleh India terhadap wilayah-wilayah Ladakh (Mardiana, 2021) Insiden ini mengakibatkan tewasnya dua puluh tentara India dan empat tentara China. Walaupun China dan India melakukan sebuah kesepakatan untuk menurunkan ketegangan di perbatasan pada Februari 2021. Namun negosiasi yang dilakukan tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan.

Tentunya, sebuah konflik tidak jauh dari kerugian baik dari segi perekonomian dan sektor lainnya. India merasa dirugikan akibat serangan yang dilakukan China. Akibatnya India melakukan pemboikotan terhadap teknologi dan ratusan aplikasi buatan China termasuk Aplikasi raksasa seperti TikTok dan WeChat. Tindakan India secara selektif dan diskriminatif menyudutkan aplikasi China tertentu dengan alasan yang ambigu dan dibuat-buat, bertentangan dengan persyaratan prosedur yang adil dan transparan, menyalahgunakan pengecualian keamanan nasional dan (dicurigai) melanggar aturan WTO 19. Pemerintah India menunjukkan sentimen anti-China dengan mengubah kebijakan, memperlambat aktivitas ekonomi perusahaan China yang bergantung pada pasar India. Masyarakat ikut memboikot produk China, sementara pemerintah menghentikan investasi dan menaikkan tarif usai insiden di perbatasan Himalaya yang menewaskan 20 tentara India.

Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan karena sulitnya menggantikan produk China yang dikenal murah dan berkualitas tinggi, serta keterbatasan alternatif impor dari negara lain. Terhalangnya Perusahaan besar untuk menginjakan kakinya dan berinvestasi terhadap *startup-startup* di India. Banyak Perusahaan *startup* yang populer di India mengalami kerugian yang sangat besar hingga mencapai miliaran.(Guest, 2020)

Kebijakan India adalah langkah yang serba salah ditambah sentiment terhadap China yang menjalin hubungan dengan Pakistan yang memiliki hubungan tidak baik terhadap India. Beijing juga dirasa memiliki pengaruh yang dapat membantu atau merugikan kepentingan India di badan-badan internasional utama, khususnya Dewan Keamanan PBB. Ketegangan dengan China memuncak ketika Xi Jinping absen dalam KTT G20 di New Delhi dan

China merilis peta yang mengklaim Arunachal Pradesh dan Aksai Chin. Hubungan memburuk seiring India mendekati ke Barat melalui aliansi Quad bersama AS, Australia, dan Jepang. Latar belakang ini mendorong peneliti untuk menganalisis kebijakan India memboikot industri teknologi China pada 2020–2023.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tinjauan pustaka utama: *Seizing a Window of Opportunity? The Causes and Consequences of the 2020 Sino-Indian Border Stand-off* karya Stephen P. Westcott, yang membahas ketegangan perbatasan India-China di LAC (*Line of Actual Control*) dan dampaknya terhadap hubungan bilateral kedua negara; Perang Sino-India (1962): Polemik Sengketa Perbatasan China-India dalam Sudut Pandang Konstruktivisme, yang menganalisis konflik 1962 dari perspektif konstruktivisme, menyoroti kepentingan nasional sebagai konstruksi sosial; serta Sengketa Perbatasan Sino-India dalam Kepentingan Geopolitik China yang meninjau konflik perbatasan di LAC 2020 dari perspektif geopolitik China, termasuk pendekatan keamanan dan proyeksi kekuatan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor internal dan eksternal yang mendorong kebijakan India memboikot teknologi China akibat konflik perbatasan 2020-2023. Dengan pendekatan realisme neoklasik dan konsep kebijakan luar negeri James N. Rosenau, penelitian ini menjawab pertanyaan, **Mengapa India memboikot industri teknologi China?** Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri dipengaruhi faktor internal dan eksternal yang terdiri dari lima variabel: individu, peran, pemerintah, sosial, dan sistemik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif dengan mengumpulkan data melalui dokumen dan literatur ilmiah, serta mengembangkan panduan pengumpulan data. Metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan definisi John Cresswell, yang menyatakan bahwa metode ini bertujuan untuk memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau kemanusiaan yang dirasa relevan untuk mengetahui alasan dari kebijakan boikot yang dikeluarkan India.

PEMBAHASAN

Variabel Sistemik : Sentimen Atas Hubungan China Dengan Pakistan

Hubungan India, China, dan Pakistan membentuk segitiga konflik, di mana China dan Pakistan menantang posisi India di kawasan. Konflik India-Pakistan berakar dari *Partition of Bengal* 1946 dan kemerdekaan 1947, melibatkan sengketa Kashmir, *Indus Water Treaty*, Sir Creek, dan Siachen, ditambah tuduhan India bahwa Pakistan mendukung militan. Ketegangan India-China mencakup perbatasan Aksai Chin, Sikkim, Arunachal Pradesh, serta dukungan China terhadap Pakistan.

Di bawah kebijakan "*Neighborhood First*," PM Narendra Modi fokus memperkuat hubungan India dengan negara-negara SAARC dan Asia Tenggara melalui diplomasi, bantuan, konektivitas, dan integrasi regional. Namun, hubungan dengan China dan Pakistan tetap tegang, tercermin dari absennya kunjungan Modi ke kedua negara pada period eke II masa jabatannya. (Kepakistan, 2018)

Kedekatan China dengan Pakistan melalui proyek *China-Pakistan Economic Corridor* (CPEC) sejak 2015 memengaruhi sentimen India. Sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI), CPEC bertujuan memperkuat infrastruktur Pakistan dengan investasi sebesar \$46 miliar, mencakup transportasi, energi, dan konektivitas pelabuhan Pakistan dengan Xinjiang, China. Proyek ini dirancang untuk mengurangi biaya pengangkutan barang ke China dengan menghindari jalur Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, yang mendorong perubahan orientasi kebijakan India terhadap kawasan. (Britannica, 2024)

India memandang (CPEC) sebagai ancaman karena tiga alasan utama: CPEC mengurangi dominasi India di Asia Selatan, melemahkan klaim India atas Gilgit-Baltistan, dan memperkuat dominasi ekonomi serta maritim China, khususnya melalui pelabuhan Gwadar yang dapat digunakan untuk operasi angkatan laut di Laut Arab. India juga khawatir terhadap hubungan erat China-Pakistan dalam teknologi nuklir dan rudal, serta ketergantungan Pakistan pada China yang mendukung ambisi strategis Beijing. Sebagai

respons, India memboikot industri teknologi China, melihat CPEC sebagai potensi pengubah keseimbangan kekuatan regional yang merugikan India, terutama dalam keamanan Indo-Pasifik. (Pitlo, 2022)

Variabel Sosial : Sikap Anti China Dari Masyarakat India

Ketegangan di perbatasan India-China, terutama insiden di Lembah Galwan, Ladakh, yang menewaskan 20 tentara India dan melukai puluhan dari pihak China, telah memicu sentimen anti-China di India. Akibatnya, warga negara China di India merasa cemas akan keselamatan mereka, sebagian besar memilih tetap berada di rumah dan menghindari perhatian publik. Meski beberapa percaya pada keramahan masyarakat India, kekhawatiran tetap tinggi. Menurut Dr. Sangay, Presiden Administrasi Tibet di pengasingan, Ia percaya bahwa menyelesaikan isu Tibet adalah langkah penting untuk mengakhiri konflik perbatasan yang terus terjadi.

Akibat ketegangan di perbatasan tersebut menimbulkan demonstrasi dan gelombang anti China. Sebagai contoh Anil Gupta, seorang pejabat senior bea cukai di ibu kota India yang membakar barang pribadinya berlabel "*Made in China*," menyatakan, bahwa "Saya merasa seperti telah membakar tiga atau empat orang China, dan membalas dendam atas kematian tentara kita." Pernyataan Gupta ini mencerminkan gelombang sentimen nasionalis anti-China yang saat ini tengah meluas di kalangan warga India. India menuduh China membangun Infrastruktur di wilayahnya, yang memicu bentrokan di perbatasan dan korban jiwa. Sebaliknya, China menuduh India mendirikan infrastruktur di Lembah Galwan dan menyerang pasukannya. Sebagai tanggapan, India mengambil langkah tegas, termasuk melarang 59 aplikasi asal China. (Anand, 2020)

Sonam Wangchuk, reformis dari Ladakh, menyerukan boikot produk China melalui video viral yang diikuti aksi dari selebriti dan protes di berbagai kota. Ketegangan ini mendorong India memblokir total 232 aplikasi China pada 2023, memperkuat kebijakan untuk membatasi dominasi teknologi China di pasar domestik.

Variabel Pemerintah : Ideologi Hindutva di India

Partai Bharatiya Janata (BJP), yang dianggap marginal, meraih mayoritas sejak 2014 di bawah PM Narendra Modi. Kampanye 2019

memperburuk ketegangan etnis melalui kebijakan populis yang memuaskan basis nasionalis Hindu, termasuk amandemen kewarganegaraan, pencabutan otonomi Jammu dan Kashmir, serta isu diskriminasi Muslim. Mayoritas Hindu 80% memperkuat politik mayoritarian, mencoreng reputasi India sebagai demokrasi sekuler.

Di bawah pemerintahan Modi, kebijakan luar negeri India dipengaruhi ideologi Hindutva, yang menekankan nasionalisme Hindu, kemandirian, dan kekuatan nasional. Hindutva membentuk pendekatan India terhadap ancaman eksternal, penguatan militer dan ekonomi, serta keterlibatan dengan aliansi seperti Quad. (Singh, 2021)

Mobilisasi ideologi Hindutva dapat dianalisis melalui karya-karya tokoh seperti Vinayak Savarkar (1923) dan M.S. Golwalkar (1939). Golwalkar, dalam bukunya *We, or Our Nationhood Defined*, mengambil inspirasi dari Nazi Jerman, terutama dalam hal penekanan pada kelahiran dan ras sebagai fondasi identitas nasional. Ia menyatakan bahwa hakikat suatu bangsa terletak pada peradabannya (Kultur), dengan menekankan pentingnya homogenitas ras dan budaya untuk mempertahankan keutuhan bangsa. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi gerakan nasionalis Hindu yang lebih besar, yang berfokus pada membentuk India sebagai negara Hindu yang kuat dan murni secara budaya. (Kalhan, 2023)

Hindutva, ideologi nasionalisme Hindu yang dikembangkan oleh V.D. Savarkar, menekankan kebangsaan (*Rashtra*), ras (*Jati*), dan budaya (*Sanskriti*). Ideologi ini mendukung kemandirian nasional, kekuatan internal, dan sikap tegas terhadap ancaman eksternal. BJP, yang mengadopsi seruan "Jai Shri Ram" sebagai simbol nasionalisme Hindu, sering dikritik karena dianggap separatis dan dikaitkan dengan fasisme. Insiden ekstremisme Hindu, seperti penghancuran Masjid Babri pada 1992 dan pembunuhan Mahatma Gandhi pada 1948, mencerminkan ketegangan ini. Di bawah kepemimpinan Narendra Modi, BJP memengaruhi kebijakan India, termasuk memboikot teknologi China, sebagai respons terhadap kedekatan China dengan Pakistan dan konflik perbatasan. (KumparanNews, 2023)

Variabel Peran : Peran India Sebagai Pasar Utama Bagi China

India diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar ketiga dunia pada 2030, mengikuti AS dan China, dengan pertumbuhan PDB rata-rata 6,3% per tahun. Morgan Stanley memperkirakan PDB India akan lebih dari dua kali lipat pada 2031, melampaui Jepang, Jerman, dan Inggris. Pangsa manufaktur terhadap PDB diperkirakan naik dari 15,6% menjadi 21%, dengan pendapatan manufaktur mencapai US\$ 1,49 triliun. Faktor seperti pertumbuhan populasi, konsumsi produk teknologi China, dan potensi India sebagai saingan ekonomi dan militer mendorong kebijakan boikot India terhadap industri teknologi China. Meski optimisme investasi meningkat, tantangan seperti resesi global dan kekurangan tenaga kerja tetap menjadi risiko. (Indonesia, 2023)

India, sebagai pesaing utama China, tidak ragu memboikot produk teknologi China meski memiliki hubungan ekonomi kuat. Dari April hingga Februari, 11,8% impor India berasal dari China, sementara ekspor India ke China hanya 3%, menyebabkan defisit perdagangan sebesar US\$ 3,3 miliar, naik 13% dari tahun sebelumnya. *The Confederation of All India Traders* (CAIT) berupaya menurunkan impor US\$ 70 miliar menjadi US\$ 13 miliar, menggantikannya dengan produk lokal. (Citradi, 2020)

Impor utama mencakup elektronik dan mesin, sedangkan ekspor India meliputi senyawa kimia dan bijih mineral. Ketegangan ini mengancam investasi China di India, termasuk sektor start-up, dan dominasi merek seperti Xiaomi. Dengan populasi terbesar, India berpotensi memanfaatkan "*dividen demografi*," sementara boikot berdampak signifikan pada kedua negara. (Bbc, 2023)

Variabel Individu : Sentimen Atas Pengalaman Konflik Tahun 1962

Pada Oktober 1962, China melancarkan serangan terhadap India akibat sengketa wilayah yang telah lama memanas. Konflik tersebut berakhir dengan kemenangan di pihak China, meninggalkan luka mendalam bagi hubungan kedua negara. Perang ini tidak hanya memperumit upaya penyelesaian sengketa teritorial tetapi juga memicu militerisasi besar-besaran di sepanjang perbatasan *de facto*. Ketegangan terus membayangi hubungan China dan India, memperburuk "dilema keamanan" yang hingga kini belum terselesaikan.

Bagi India, pengalaman pahit dari konflik 1962 membentuk pendekatan mereka terhadap berbagai eskalasi yang terjadi di tahun-tahun berikutnya, seperti insiden pada 1986, 2013, 2014, 2017, dan 2020. Sementara itu, dari perspektif China, peningkatan ketegangan di perbatasan dianggap sebagai langkah strategis yang berisiko rendah. Beijing menilai bahwa India cenderung menghindari konfrontasi besar, sehingga penggunaan eskalasi dapat menjadi cara yang efektif untuk menekan New Delhi tanpa risiko perang skala penuh. Dampak perang 1962 telah menciptakan persaingan strategis yang mendalam antara kedua negara, membentang dari isu perbatasan hingga ambisi geopolitik yang terus berlanjut hingga saat ini. (Lidarev, 2022)

Kemenangan China dalam perang 1962 memupuk rasa superioritas militer Beijing, sementara India melihat China sebagai ancaman utama, mendorong peningkatan anggaran pertahanan, reformasi militer, dan pengembangan senjata strategis. Konflik ini memperkuat persaingan di wilayah Himalaya, dengan Nepal, Bhutan, dan Sikkim menjadi elemen strategis. Manipulasi China terhadap Nepal, sengketa Bhutan-China, dan akses Sikkim ke India pada 1975 menunjukkan dinamika kompleks di kawasan tersebut.

Hubungan erat China-Pakistan pasca-perang memperburuk ketegangan, khususnya terkait Kashmir, sementara Tibet menjadi isu strategis dengan India mendukung Dalai Lama dan membentuk pasukan paramiliter Tibet. Dampak perang 1962 memperpanjang rivalitas kedua negara, memengaruhi kebijakan luar negeri India, termasuk pemblokiran aplikasi China atas alasan keamanan. Menurut Manjeet Singh Pardesi, pemerintahan Modi mengelola persaingan ini melalui kombinasi keseimbangan, akomodasi, dan konfrontasi, yang tetap dipengaruhi oleh sejarah konflik dan perbedaan kepentingan yang belum terselesaikan. (Hall & Ganguly, 2022)

Dampak India Boikot Industri Teknologi China

Kebijakan boikot industri teknologi China, seperti ponsel, dapat berdampak negatif pada perekonomian India. Banyak ponsel China diproduksi di pabrik-pabrik lokal India, dan perusahaan-perusahaan

smartphone China memiliki fasilitas penelitian dan pengembangan (R&D) di negara tersebut. India kini menjadi produsen ponsel terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 200 pabrik manufaktur dan rantai pasokan pendukung.

Pada 2020, India mengekspor 36 juta unit ponsel, sehingga boikot terhadap ponsel China berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. (Idris, 2020) Merek ponsel lokal India seperti Micromax, Lava, dan Intex kesulitan bersaing dengan dominasi merek China seperti Xiaomi, Vivo, Realme, dan Oppo yang menguasai pasar domestik. Micromax, yang sebelumnya terkemuka, mengalami penurunan setelah masuknya merek China, dengan Xiaomi memimpin pasar dengan 30% pangsa pasar, diikuti Vivo (17%), Realme (14%), dan Oppo (12%). Meskipun ada seruan untuk memboikot produk China, konsumen India masih cenderung memilih ponsel China karena harga yang kompetitif dan reputasi produk yang baik. (Burhan, 2020)

India memboikot ratusan aplikasi China, termasuk TikTok, PUBG Mobile, dan WeChat, setelah konflik perbatasan, dengan alasan keamanan nasional. TikTok kehilangan 200 juta pengguna dalam sehari, merugi hingga US\$ 6 miliar. Larangan ini juga berdampak pada influencer India seperti Geet, yang kehilangan sumber penghidupan. Meskipun produk teknologi China terjangkau dan canggih, kebijakan ini berlanjut hingga 2023, memengaruhi ekonomi China dan masyarakat India.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri India dalam memboikot industri teknologi China, Konsep kebijakan luar negeri James N. Rosenau digunakan untuk menguraikan lima variabel yang relevan. Dalam penelitian ini variabel Pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan karena ideologi Hindutva yang dianut oleh Bharatiya Janata Party (BJP). BJP, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, sebagai nasionalis Hindu memiliki sifat tegas atas segala ancaman eksternal, dan menguasai perpolitikan India. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyarankan penerapan pendekatan analisis yang berbeda, dengan mempertimbangkan dinamika ketegangan yang terus

berlanjut, terutama dalam konteks hubungan China dengan Pakistan yang memberikan implikasi signifikan terhadap kebijakan keamanan India.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

Anand, S. (2020). *India's China Border Face-Off Fuels a Wallet War*. Usnews.
<https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/2020-06-29/rising-anti-china-sentiment-in-india-targets-consumer-products>

Bbc. (2023). *Apakah India bisa mengalahkan China sebagai negara adidaya global?* BBCNewsIndonesia.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c14pknpxynqo>

Britannica. (2024). *Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan*.

<https://www.britannica.com/topic/Belt-and-Road-Initiative>

Burhan, F. A. (2020). *Dilarang di India, TikTok Kehilangan 200 Juta Pengguna & Rugi Rp 87 T*. Katadata.Co.Id.

<https://katadata.co.id/digital/nasional/5f02976ce33d0/dilarang-di-india-tiktok-kehilangan-200-juta-pengguna-rugi-rp-87-t#:~:text=Aplikasi video pendek asal Tiongkok%2C TikTok%2C menjadi salah,sampai US%24 6 miliar atau Rp 87 triliun.>

Citradi, T. (2020). *India-China Ribut di Perbatasan, Siapa Paling Merugi?* CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200623150530-4-167429/india-china-ribut-di-perbatasan-siapa-paling-merugi>

Davidson, B. D. and H. (2017). *Explainer: what is the deadly India-China border dispute about?* The Guardian.

Dewi, K. R. (2024). *3 Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Batas Wilayah*. KOMPAS.Com.

<https://www.kompas.com/skola/read/2024/04/29/160000169/3-faktor-penyebab-terjadinya-sengketa-batas-wilayah>.

Guest. (2020). *Challenging the Dragon: Is India ready to boycott China?*

Election 2024. <https://www.financialexpress.com/opinion/challenging-the-dragon-is-india-ready-to-boycott-china/2017969/>.

Hall, I., & Ganguly, Š. (2022). Introduction: Narendra Modi and India's foreign policy. *International Politics*, 59(1), 1–8.

- <https://doi.org/10.1057/s41311-021-00363-8>
- Idris, M. (2020). *Boikot Ponsel China di India: Mudah Diucapkan, Sulit Dilakukan*. Kompas.Com.
<https://money.kompas.com/read/2020/06/22/070200126/boikot-ponsel-china-di-india-mudah-diucapkan-sulit-dilakukan?page=2>
- Indonesia, C. (2023). *Salip Jepang! Negara Asia Ini Calon Ekonomi Terbesar 3 Bumi*. CNBC.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201142329-4-392931/salip-jepang-negara-asia-ini-calon-ekonomi-terbesar-3-bumi>
- Kalhan, A. (2023). We Our Nationhood Defined. *Tipping Point*, 35–116.
<https://doi.org/10.4324/9781003395669-1>
- Kepakisan, A. . G. A. B. (2018). Respon Kebijakan Luar Negeri “Neighborhood First” India Terhadap Kerjasama Bilateral China Pakistan Economic Corridor 2015. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 7(3), 12–30.
- KumparanNews. (2023). *Hindutva, Ideologi Ekstremis Hindu di India Pemicu Konflik Umat Beragama*. Kumparan.Com.
<https://kumparan.com/kumparannews/hindutva-ideologi-ekstremis-hindu-di-india-pemicu-konflik-umat-beragama-20Ed9kKBTNL/full>
- Lidarev, I. (2022). *The Echo of 1962: How the Sino-Indian War Shapes Asia*. Nationalinterest.Org. <https://nationalinterest.org/feature/echo-1962-how-sino-indian-war-shapes-asia-205911>
- Malik, M. (2017). *China and India: The Roots of Hostility*. THE DIPLOMAT.
<https://thediplomat.com/2017/09/china-and-india-the-roots-of-hostility/>.
- Mardiana, V. (2021). Krisis Doklam dan Kepentingan Nasional India. *Review of International Relations.*, 2.2, 91.
- Pitlo, L. B. (2022). *China-Pakistan Economic Corridor And India’s Responses*. Eurasiareview. <https://www.eurasiareview.com/29052022-china-pakistan-economic-corridor-and-indias-responses-analysis/>
- Rizal Jawahir Gustav. (2020). Hari Ini dalam Sejarah: Perang China-India 1962 dan Konflik Panjang Dua Negara. In *KOMPAS.com* (p. 1).
- Singh, A. P. (2021). *Hindutva’s Realism in Modi’s Foreign Policy*.

TheDiplomat.Com. <https://thediplomat.com/2021/01/hindutvas-realism-in-modis-foreign-policy/>